

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI HEGEMONI CHINA DI KAWASAN LAUT CHINA SELATAN PADA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO TAHUN 2016 – 2019

Harun Umar¹, Cemara Gita Naya²

^{1,2} Prodi HI, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Nasional
Heron9300@gmail.com , Cemaranaya25@gmail.com

Abstract

China claims Indonesia's sovereign in Natuna sea, which is located next to South China Sea (SCS). China insists that part of the Natuna sea belongs to China based on Nine-Dash Line map policy which makes it a claim to the South China Sea area. The Nine-Dash Line map was formed based on historical of China's dynasty. The China's hegemony is also shown by the islands' exploration and management in the South China Sea. The conflict between China and Indonesia has been going on for quite a long. It is marked by the China's actions in sending their fishing vessels to cross the Exclusive Economic Zone (EEZ) and doing the illegal fishing in Natuna sea. There are several confrontation issues between China's vessel and Indonesia sea in Joko Widodo's reign, but they are undaunted. They show implicit support to Indonesia's sovereignty. This research used descriptive method to describe the conflicts in the South China Sea. There were 2 (two) concepts and 1 (one) theory in this research. Those were the Concept of National Interest, the Concept of Sovereignty and Geopolitical Theory. The results of this reasearch showed that the government in Joko Widodo's reign has attempts in many ways in the face of China's hegemony that was built in South China Sea, especially in Natuna Sea area. The attempts included the President's assertive demeanor by visiting Natuna, also holding the military training and development. In fact, Indonesia continued its diplomatic attempt in carrying out its role as an honest broker to the South China Sea conflict.

Keywords : *Hegemony, South China Sea, Sovereignty, Area.*

A. Pendahuluan

Perairan di Kepulauan Natuna ikut terkena klaim atas kebijakan sembilan garis putus – putus yang dikeluarkan China di kawasan Laut China Selatan. Walaupun tidak terlibat secara langsung dalam sengketa di Laut

China Selatan dan menjadi *non-claimant state*, namun Indonesia memiliki kedaulatan di perairan dan hak berdaulat di perairan yuridiksi pada kawasan Laut China Selatan, sehingga mempunyai kepentingan terhadap keamanan wilayah tersebut. Kepentingan Indonesia di sebagian wilayah Laut China Selatan tersebut terdiri atas keutuhan wilayah, stabilitas kawasan, dan kepentingan ekonomi.

Kepentingan atas keutuhan wilayah terkait dengan batas klaim *nine dash lines* China atas wilayah Laut China Selatan yang tidak dapat didefinisikan, yang kemudian menyentuh perairan yuridiksi Indonesia ZEE dan landas kontinen Indonesia di perairan utara Kepulauan Natuna. Karena pada dasarnya perairan utara Kepulauan Natuna seutuhnya milik Indonesia yang secara gamblang di klaim China lewat peta *nine dash line* miliknya. Kemudian, adanya kepentingan ekonomi Indonesia ini, menyangkut hak berdaulat atas sumberdaya alam di ZEE dan landas kontinen Indonesia baik dari aspek energi maupun perikanan, pada kawasan Laut China Selatan. Ketiga kepentingan tersebut merupakan hal utama untuk dipertahankan negara Indonesia. Sebagaimana dari kepentingan Indonesia tersebut tergolong sebagai *Shared Interest* bersama negara negara lain di kawasan Asia Pasifik, khususnya terhadap kepentingan stabilitas kawasan¹.

Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara dikawasan perbatasan laut Indonesia yang salah satunya adalah menggalakkan kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia. Kemudian, dalam memperjelas batasan-batasan wilayah laut Indonesia yang bersinggungan dengan wilayah laut negara lain maupun wilayah laut bebas, Presiden Joko Widodo melakukan pembenahan peta baru wilayah Indonesia serta mempertegas batas wilayah laut Indonesia yang salah satunya memberi nama perairan Pulau Natuna dengan nama Laut Natuna Utara berada di wilayah Laut China Selatan pada Juli 2017 lalu.

Laut China Selatan merupakan sebuah perairan dengan berbagai potensi yang kaya raya, karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam ditambah dengan peranannya penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan, dan pelayaran internasional. Potensi besar yang dimiliki wilayah Laut China Selatan menjadikan kawasan ini berkonflik yang dibintangi oleh banyak aktor negara dari Asia Timur dan Tenggara. Laut China Selatan (LCS) merupakan bagian dari Samudera Pasifik yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3.5 juta km². Sejarahanya wilayah LCS memiliki peran geopolitik yang sangat besar karena menjadi titik temu antara China dengan negara-negara yang berbatasan dengan LCS lainnya yang merupakan negara anggota ASEAN dan memiliki beberapa masalah territorial, keamanan, dan kedaulatan.²

Pada dasarnya Laut China Selatan bukan merupakan kepemilikan negara manapun, kawasan ini dapat disebut dengan *no man's island*, namun laut ini sudah biasa digunakan untuk jalur perdagangan antar negara.³ Kawasan Laut China Selatan berada di sekitar negara yang memiliki pantai yaitu Indonesia, China, Malaysia, Vietnam, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja dan Thailand. Potensi letak yang sangat strategis ini yang kemudian menjadikan Laut China Selatan sebagai jalur terbaik untuk perdagangan antar negara kawasan. Dilihat dari aktor-aktor yang ikut didalam konflik persengketaan Laut China Selatan ini, konflik yang terjadi ini sudah menjadi konflik antar regional. Itu dikarenakan China yang berada didalam regional Asia Timur masuk dalam konflik wilayah yang disengketakan oleh negara-negara dari regional Asia Tenggara.

Sejak awal mula memanasnya LCS yaitu pasca Perang Dunia II saat China mengumumkan peta wilayah kedaulatannya dan mengklaim wilayah kepulauan Spratly, Paracels dan Pratas di tahun 1972. Pada masa itu ada enam pihak *Claimant State* yang terlibat secara langsung yaitu China, Taiwan, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Malaysia. Oleh karena itu, bila dilihat dari peta yang dibuat oleh China sendiri, letak geografis Laut China Selatan menjadi tumpang tindih pada perbatasan satu dan lainnya.

China mengklaim wilayah Laut China Selatan yang berdasarkan fakta sejarah dimulai era Dinasti Han 110 sebelum masehi. Era itu dilakukan ekspedisi laut ke *Spratly Islands* oleh bangsa China ketika Dinasti Ming 1403-1433 masehi. Kemudian China memperkuat klaimnya ini dengan mengeluarkan peta *nine-dashed lines* (sembilan garis putus-putus) pada tahun 1947 dan Mei 2009. Berdasarkan peta itu, China mengklaim semua pulau yang ada di wilayah itu mutlak miliknya, bahkan China mengklaim perairan yang berada di wilayah tersebut masih miliknya, termasuk kandungan laut maupun tanah di bawahnya⁴ Dengan ini, negara-negara yang terletak di kawasan Laut China Selatan tidak menerima keputusan sepihak itu.

Keterlibatan Indonesia muncul setelah China menggambar peta laut Natuna di Laut China Selatan, masuk peta wilayahnya dengan *nine dash line*, bahkan dalam paspor terbaru milik warga China juga sudah tercantum.⁵ Padahal dasar hukum kepemilikan Indonesia atas semua pulau di Natuna sangat kuat di balik sabuk sakti laut teritorial 12 mil yang dideklarasikan oleh Djuanda pada 1958. Selain itu Pulau Natuna sebagai bagian dari wilayah Indonesia juga diakui oleh United Nation on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) dan telah didaftarkan di Perserikatan Bangsa - Bangsa tanpa ada protes dari satu negara pun.

B. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan Nasional merupakan konsep yang berkaitan erat dengan strategi politik luar negeri suatu negara, baik yang dipengaruhi oleh

falsafah negara yang bersangkutan maupun oleh warisan sejarah karena adanya kepentingan nasional Indonesia terhadap wilayah kedaulatannya. Menurut Daniel S. Papp menyatakan bahwa kepentingan nasional bisa bersifat objektif dan subjektif karena tidak hanya bersifat materi namun juga bersifat non materi.⁶

Menurut Hans J. Morgenthau di dalam "*The Concept of Interest defined in Terms of power*", konsep kepentingan nasional (*National Interest*) yang didefinisikan dalam istilah "power" menurut Morgenthau berada diantara nalar, akal atau "reason" yang berusaha untuk memahami politik internasional dengan fakta-fakta yang harus dimengerti dan dipahami. Dengan kata lain, power merupakan instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasional⁷

Sedangkan menurut KJ. Holsti kepentingan nasional dibagi menjadi 3 bentuk yaitu⁸ :

1. *Core Values* – Suatu kepentingan nasional yang ingin dicapai merupakan nilai inti atau nilai dasar, yang dapat dikatakan sebagai suatu macam tujuan, dan bersifat vital bagi negara yang menyangkut hal eksistensi. Hal-hal tersebut meliputi, pertahanan kedaulatan negara, keamanan nasional, lalu untuk mempertahankan suatu sistem sosial, politik, ekonomi pada suatu wilayah.
2. *Middle Range Objectives* – Kepentingan nasional ini memiliki tujuan dalam jangka waktu menengah sebagai kebutuhan suatu negara memperhitungkan aktivitas politik, ekonomi maupun budaya dalam kurun waktu yang cukup lama guna mampu memperhitungkan tercapainya kepentingan suatu negara. Tujuan yang dapat dicapai dalam kepentingan jangka menengah ini meliputi kerjasama internasional, prestise, dan perlindungan kepentingan.
3. *Long Range Objectives* – Sesuatu yang bersifat ideal dan memiliki dampak jangka panjang. Salah satunya ialah dengan membentuk organisasi-organisasi dalam sistem internasional dan mengatur peranan negara didalamnya. Melalui pembentukan suatu organisasi regional maupun internasional, suatu negara yang mendominasi dalam organisasi tersebut mampu untuk menanamkan nilai nilai, sistem dan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara.

Kepentingan nasional menjadi sebuah tujuan negara dalam mencapai kelangsungan hidup negara. Adanya klaim China atas Laut China Selatan yang teritorialnya tumpang tindih dengan perairan Natuna membuat Indonesia terganggu, dan kemudian mengganggu kedaulatan Indonesia yang berarti juga mengganggu Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Selain itu, setiap negara yang melakukan atau mengambil langkah maupun menetapkan keputusan dalam hubungan internasional

berupa strategi, kebijakan luar negeri, diplomasi maupun langkah aksi militer semua itu awalnya akan dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional suatu negara.

C. Teori Geopolitik

Teori geopolitik mempunyai fokus untuk mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Para ahli geopolitik mengkaji tentang implikasi suatu wilayah atau teritorial dan sumber daya alam bagi perilaku dan perkembangan suatu negara. Besarnya luas tanah suatu negara menunjukkan posisi kekuatannya. Oleh karena itu semua negara berjuang dan berkompetisi untuk memperluas batas-batas wilayahnya. Semakin kuat posisi suatu bangsa, semakin kuat pula dorongannya untuk melakukan ekspansi.⁹

Menurut Rudolf Kjellen teori kekuatan geopolitiknya, Pokok-pokok teori Kjellen menyebutkan:

- a) Negara merupakan satuan biologis seperti suatu organism hidup, yang memiliki intelektualitas. Negara dikatakan mampu memiliki ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas.
- b) Negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demo politik, dan krato politik (politik memerintah)
- c) Negara harus mampu berdikari serta memanfaatkan kemajuan sumber daya kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya: ke dalam untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis dan ke luar untuk mendapatkan batas-batas negara yang lebih baik. Sementara itu kekuasaan Imperium Kontinental dapat mengontrol kekuatan maritim.¹⁰

Geopolitik merupakan daerah irisan antara *political science* dengan *political geography* sehingga geopolitik atau dalam konteks lain hubungan antara geografi dan politik sering juga disebut *human geography* yang prinsipnya menyangkut hubungan antara *political behavior* dan *psycal features*. Artinya erat hubungan antara perilaku politik negara dan lingkungan geografinya.¹¹ Griffith menyatakan bahwa:

*Geopolitics is the study of the influence of geographical factors on state behaviour – how location, climate, natural resources, population, and physical terrain determine a state's foreign policy options and its position in the hierarchy of states*¹²

Geopolitik adalah studi tentang pengaruh faktor geografis terhadap perilaku negara - bagaimana lokasi, iklim, sumber daya alam, populasi, dan medan fisik menentukan opsi kebijakan luar negeri suatu negara dan posisinya dalam hierarki negara.¹³

Geopolitik merupakan kajian terapan yang menghubungkan antara lingkup geografis dengan politik. Teori geopolitik dalam studi Hubungan Internasional merupakan studi yang mengkaji dengan melihat masalah atau hubungan internasional dari perspektif ruang atau geosentrik.¹⁴ Kemudian Teori geopolitik digunakan sebagai teori pendukung dari analisis penelitian yang berfokus kepada konflik yang terjadi pada kawasan serta kepentingan masing-masing negara pada kawasan.

D. Teori Hegemoni

Hegemoni menjadi kontrol atau mendominasi badan bawahannya. Negara hegemoni menetapkan dan memberlakukan aturan dasar dan hak-hak yang mengatur perilaku umum dalam sistem. Ada beberapa elemen yang berbeda yang memungkinkan hegemon muncul, tetapi menurut Gilpin apa yang paling penting adalah prestige (prestise) negara hegemoni. Prestise, menurut Gilpin, sama dengan otoritas di tingkat domestik. Prestise bukanlah kekuatan yang sebenarnya, tetapi diproyeksikan hasil dari kekuatan yang dimiliki dalam negara. Jadi kesamaan, prestise dan kekuasaan yang baik diperlukan untuk membuat negara-negara yang lebih rendah taat pada negara yang dominan.¹⁵

Robert Keohane menekankan pentingnya peranan hegemoni sebagai berikut :

“Pertahanan hegemoni struktur kekuatan, yang di dominasi oleh satu Negara, adalah lebih kondusif terhadap perkembangan rezim internasional yang kuat dan peraturannya relatif lebih tepat dan dipatuhi. Kemunduran dari struktur hegemoni kekuasaan diharapkan dapat menandakan sebuah penurunan kekuatan hubungan dari rezim internasional”¹⁶

Salah satu teori hegemoni yang berkembang adalah teori stabilitas yang berorientasi kepada perkembangan ekonomi politik internasional. Teori Stabilitas Hegemoni adalah teori yang signifikan dalam memahami peran yang dimainkan oleh kekuatan hegemonik dan hubungan dengan perkembangan ekonomi dan stabilitas politik dalam struktur internasional. Poin kunci dalam Teori Stabilitas Hegemonik adalah bahwa harus ada kekuatan hegemonik, yaitu kekuatan tunggal yang dominan dalam sistem internasional untuk memastikan stabilitas ekonomi dan politik internasional.¹⁷

Kriteria Keohane tentang kekuatan hegemonik hanya menekankan faktor-faktor yang terkait dengan ekonomi dan perdagangan. Suzan Strange menyarankan empat elemen kekuatan struktural yang dapat disebut posisi global hegemoni;¹⁸

1. Kemampuan untuk mengancam atau melindungi keamanan fisik negara lain dengan menggunakan senjata (elemen keamanan)
2. Kemampuan untuk mengendalikan sistem global produksi barang dan jasa (elemen produksi)
3. Kemampuan untuk membentuk pasar modal internasional keuangan dan kredit (elemen keuangan)
4. Kemampuan untuk mengarahkan pengembangan, akumulasi dan transfer pengetahuan (elemen pengetahuan)

Hegemoni China sendiri di terapkan bersama dengan kekuatan dominasinya dikawasan tersebut, melipti bidang ekonomi dan politik kawasan, dimana China mendominasi Laut China Selatan dengan melakukan ekspansi dan eksplorasi terhadap kawasan tersebut. Selain itu, pemerintah China juga melakukan dominasinya dengan memperkuat kerjasama ke negara sekitar kawasan LCS di bidang investasi ekonomi.

E. Gambaran Umum Kepentingan Indonesia Dalam Menghadapi China Di Kawasan Laut China Selatan

Perairan Natuna terletak di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan kepulauan utara selat Karimata. Kepulauan Natuna berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura dan Vietnam.¹⁹ Natuna memiliki luas wilayah 141.901 km² dengan luas perairan (lautan) yang lebih dominan, yaitu sebesar 138.666,0 km² dan 3.235,20 km² luas wilayah daratan, atau sebesar 2,4% berupa 271 pulau besar dan kecil.²⁰

Wilayah Perairan Natuna adalah jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan menjadi jalur perairan internasional. Wilayah Perairan Natuna berbatasan langsung dengan negara tetangga, dan juga terhubung dengan perairan bebas sehingga wilayah ini rawan terhadap aktifitas *illegal fishing* (penangkapan ikan ilegal). Produksi perikanan Natuna mencapai angka 8,9 % dari potensi sumber daya alamnya,²¹ wilayah perairan ini juga sangat kaya akan potensi sumber daya energi. Perairan Natuna memiliki luas wilayah 61% wilayah terbuka dan 39% lainnya adalah wilayah kerja perminyakan yang berlokasi di lepas pantai. Cadangan minyak buminya diperkirakan mencapai 1.400.386.470 barel, sedangkan gas bumi 112.356.680.000 barel.²²

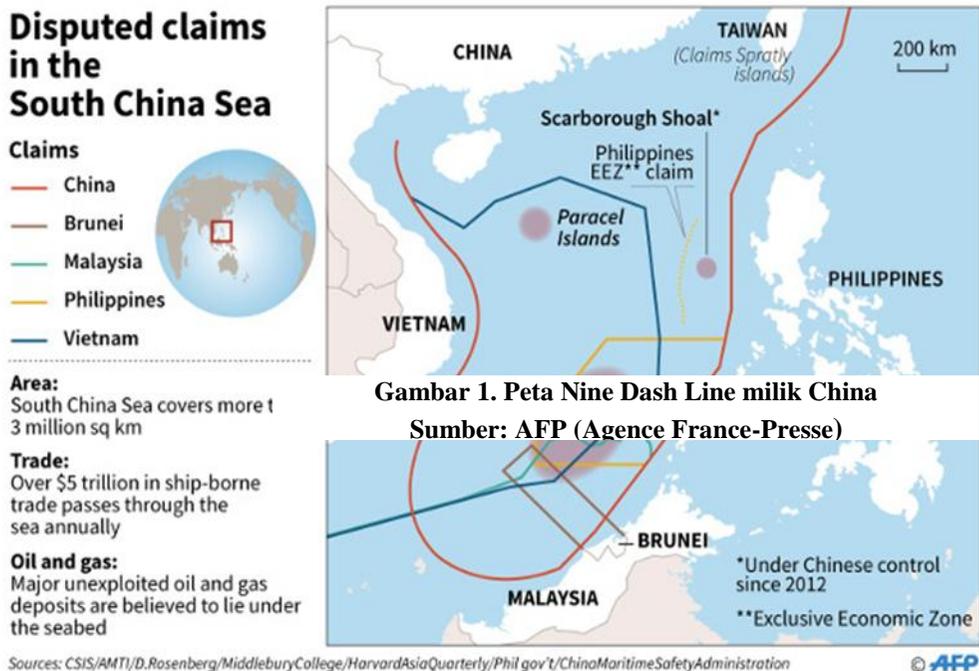
Walaupun perairan Natuna ini secara internasional terletak di kawasan Laut China Selatan, namun Indonesia tidak ikut mengklaim wilayah perairan LCS. Kawasan perairan Natuna sudah menjadi kawasan milik Indonesia, tetapi seketika di klaim oleh China secara sepihak kedalam peta *Nine Dash Line*-nya. Pada tahun 2009 China mengeluarkan peta degan mencantumkan perairan Natuna kedalam klaimnya di Laut China Selatan, tidak lagi hanya kepada pulau Spratly dan Parcel.

Kepentingan Indonesia di Laut China Selatan adalah menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Pada era Presiden Joko Widodo, strategi Indonesia terhadap persengketaan Laut Cina Selatan tetap menekankan pada pendekatan aktor diplomasi aktif yang mencari penyelesaian damai untuk menghindari persengketaan yang lebih luas. Hal ini demi melindungi kepentingan-kepentingannya di sekitar Kepulauan Natuna.

Tidak hanya menjaga stabilitas kawasan, Indonesia juga berkepentingan untuk menjaga integritas hukum laut Internasional yang diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Pada tahun 2010 Indonesia menulis dalam catatan verbal kepada Sekretaris Jendral Persikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa klaim China tentang sembilan garis putus-putus, “tidak memiliki basis hukum internasional”. Menurut hukum internasional klaim China di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Itu sebabnya, untuk mempertegas kepemilikan Indonesia di Natuna, komitmen Indonesia terhadap UNCLOS menjadi prioritas.²³

Kepentingan Indonesia lainnya adalah kepentingan ekonomi, dimana setiap tahun nilai perdagangan yang melintasi Laut China Selatan senilai US\$ 5,3 triliun. Indonesia sendiri mempunyai pangsa pasar yang relatif besar mengingat ekspor impor ke China dan Jepang semuanya melalui Laut China Selatan. Ditambah eksplorasi minyak dan gas dilaut Natuna serta kekayaan alam laut Natuna lainnya yang juga di eksplorasi untuk peneningan ekonoI negara.

Atas klaimnya, China mengeluarkan peta Sembilan garis putus-putus diatas wilayah LCS. Sebuah garis imajiner dimana wilayah dalam garis tersebut merupakan daerah kepemilikan China atas kawasan tersebut yang mencakup 90% dari luas wilayah atau sekitar 3,5 juta km² perairan Laut China Selatan. Peta ini ditegaskan pada saat Partai Komunis berkuasa pada tahun 1953. Klaim ini atas dasar sejarah Cina Kuno, mulai dari dinasti Han yang berkuasa pada abad 2 SM sampai dengan Dinasti Ming dan Dinasi Qing di abad 13 SM. Kemudian pasca Perang Dunia II tepatnya pada tahun 1972 saat China mengumumkan peta wilayah kedaulatannya dan mengklaim wilayah kepulauan Spratly dan Paracels.



China telah mengklaim lebih dari 95% Laut China Selatan dan mengandalkan kawasan tersebut sebagai pemasok 85% impor minyak mentah China. China juga mengklaim pulau-pulau kecil di Laut China Selatan dan telah membangun sekitar 1.300 hektar lahan untuk menopang sebagian besar infrastruktur militer, termasuk landasan pacu yang cukup panjang untuk bisa menampung pesawat pengebom.²⁴

Selain itu, China ingin melakukan ekspansi besar – besaran sesuai dengan visi misinya membuat jalur perdagangan *One Belt One Road* (OBOR). OBOR adalah sebuah jalur perdagangan dan ekonomi baru yang menghubungkan Asia hingga Eropa dan terdiri dari sekitar 60 negara yang melalui jalur sutra. OBOR memiliki dua prinsip utama, yaitu *One Belt dan One Road*. *One Belt* mengacu pada *Silk Economic Road* atau rute perdagangan yang melalui jalur sutra berbasis daratan dari China, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah hingga Eropa yang juga akan didukung dengan jalur rel, jalan raya, dan jaringan pipa baru. Sedangkan, *One Road* mengacu pada *21st Century Maritime Silk Road* atau sebuah jalur sutra berbasis laut yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, Timur Tengah dan Eropa.²⁵

F. Langkah Pemerintahan Joko Widodo Menghadapi Hegemoni China Di Laut China Selatan

Pada pemerintahan Joko Widodo hubungan antar Indonesia dengan China mengalami peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan investasi besar, mendorong Indonesia untuk melakukan kerjasama ekonomi secara intensif dengan China. Nilai Investasi langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) China ke Indonesia pada periode 3 Triwulan 2019 melesat hingga 81% mencapai angka US\$ 3.31 miliar atau setara dengan Rp. 46.39 Triliun. Nilai ini mencapai 139% dari total FDI di sepanjang tahun 2018. Ditambah jumlah proyek yang meningkat menjadi 1.619 proyek yang berarti meningkat 28% dibanding sepanjang tahun 2018 yang hanya mencapai 1.562 proyek.²⁶

Hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China dinilai menjadi salah satu poin dari penanaman hegemoni China di kawasan Laut China Selatan, sebab Indonesia juga sebagai negara yang ikut andil dalam permasalahan Laut China Selatan ini. Tetapi, pemerintah Indonesia dengan tegas menunjukkan walaupun memiliki hubungan yang baik dengan China pada bidang ekonomi, tetapi Presiden Joko Widodo tidak terpengaruh dalam sikap pertahanan kedaulatan Indonesia yang diganggu oleh China di kawasan Natuna Utara.

Pada 23 Juni 2016, Presiden Indonesia Joko Widodo terbang ke Ranai, dan dengan ini menjadi kali pertama Presiden Indonesia berkunjung ke Natuna Besar. Kunjungan ini dilanjutkan dengan diadakannya rapat kabinet terbatas. Rapat tersebut mendiskusikan perkembangan bidang pertahanan dan ekonomi wilayah, yang kaya akan ikan dan gas alam.²⁷ Pemerintah Indonesia mengajak China menghormati hukum internasional. Harapan ini disampaikan terkait insiden kegagalan Penyitaan KM. Kway Fey 10078 berbendera China di Laut Natuna. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah memanggil perwakilan China Sun Weide yang dalam hal ini adalah Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar China di Jakarta, untuk menyampaikan Nota Protes Diplomatik atas persoalan tersebut, yakni²⁸ :

- a. Terkait masalah pelanggaran hak berdaulat dan yuridiksi Indonesia di kawasan ZEE dan landas kontinen;
- b. Protes upaya yang dilakukan oleh Kapal *Coast Guard* China untuk mencegah upaya penegakan hukum yang dilakukan otoritas Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen;
- c. Protes adanya pelanggaran terhadap kedaulatan laut territorial Indonesia

Pada tanggal 14 Juli 2017 Indonesia akhirnya mengeluarkan peta baru yang didalamnya terdapat perubahan di beberapa perbatasan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengklarifikasi perubahan istilah Laut

China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Secara garis besar, pembenanahan peta wilayah Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah penegasan batas-batas zona maritim di daerah Natuna Utara yang bersinggungan dengan LCS. Dilihat secara historis, LCS merupakan wilayah yang berpotensi dilanda konflik karena berbatasan dan bersinggungan langsung dengan batas-batas zona ekonomi eksklusif negara-negara di Asia Tenggara maupun negara Asia Muka seperti China.

Adanya keseriusan yang terjadi pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo atas pertahanan kedaulatan negara Indonesia di kawasan Natuna. Akhir tahun 2019 Presiden Joko Widodo sudah memasuki periode keduanya menjadi Presiden Indonesia, namun komitmennya terhadap keamanan wilayah perbatasan di perairan Natuna tidak lah main-main. Hal ini dibuktikan dengan adanya aksi cepat yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam penanganan konfrontasi kapal China di perairan Natuna yang baru terjadi belakangan ini.

G. Kebijakan Pertahanan Keamanan dan Diplomasi Masa Pemerintahan Joko Widodo

Secara juridis formal, Indonesia sudah sangat kuat atas kepemilikan wilayah lautnya, namun mempunyai konsekuensi yang tidak ringan, yaitu Indonesia harus mampu menjaga laut dan kekayaannya dari negara lain. Jika tidak mampu menjaganya, maka negara asing semakin leluasa untuk mencuri dan mengambil alih kekayaan laut di wilayah Indonesia.

Indonesia adalah kekuatan terbesar kedua setelah China dalam konflik di Laut China Selatan. TNI AL saat ini memiliki 2 kapal selam, 12 kapal fregat dan perusak, 27 korvet, 64 kapal patroli, 19 kapal pendarat tank dan 43 kapal penjaga pantai. Namun begitu usia armada laut Indonesia juga tergolong yang paling tua di kawasan. Malaysia berkekuatan 14.000 personil, 2 kapal selam anyar buatan Spanyol, Malaysia juga memiliki 10 kapal fregat atau perusak, 4 kapal korvet buatan Jerman, 33 kapal patroli dan 317 kapal penjaga pantai.²⁹

Kemungkinan terjadinya gangguan pertahanan keamanan Indonesia di Natuna dapat dikatakan dapat terjadi kapanpun. Namun karena Indonesia yang pada masa pemerintahan Preside Joko Widodo menggunakan strategi pertahanan berbasis defensif aktif, mengutamakan upaya kerja sama terkait sengketa wilayah di pulau-pulau kecil terluar tanpa tindakan agresif. Sehingga dalam kebijakan pertahanan dikenal dengan motto *defense support prosperity*. Pertahanan ditempatkan di pulau-pulau kecil terluar bukan saja untuk menjaga kedaulatan negara melalui operasi militer, tetapi juga membantu menjaga keamanan terlaksananya kegiatan pemanfaatan sumber daya penunjang perekonomian³⁰

Selain kebijakan pertahanan keamanan untuk menjaga upaya pertahanan wilayahnya di kawasan LCS, Indonesia juga menonjol pada upaya diplomasi dalam penyelesaian konflik ini melalui kebijakan-kebijakan diplomasi yang telah dilakukan. Kebijakan diplomasi diterapkan agar dapat membawa konflik di Laut China Selatan ini dengan penyelesaian yang bersifat damai. Indonesia sudah lama dikenal sebagai aktor kunci dalam perundingan dan lahirnya berbagai norma ASEAN *Way* dan pembangunan ASEAN seperti pembentukan ASEAN *Political Security Community* dan *Bali democracy Forum*. Indonesia juga merupakan juru damai atau mediator terpercaya dalam berbagai konflik regional yang terjadi, seperti konflik Thailand – Kamboja dan konflik Filipina dan Myanmar.³¹

Kebijakan hukum dan diplomasi Indonesia pada jaman Presiden Joko Widodo terkait konflik Laut China Selatan adalah melakukan pendekatan regional melalui organisasi ASEAN dan melakukan pendekatan kepada China, baik melalui ASEAN maupun secara diplomatik dan kerja sama di berbagai bidang. Melalui dua jalur tersebut Indonesia berkeinginan ikut menjaga keamanan dan perdamaian di Laut China Selatan secara umum. Pada level organisasi ASEAN, Indonesia selalu mempromosikan perdamaian di Laut China Selatan kepada anggota ASEAN dan kepada China, begitu juga pada level kerja sama diplomatiknya. Inti dari kebijakan hukum dan diplomasi Indonesia dalam menyikapi konflik di Laut China Selatan adalah secara hukum tetap memegang prinsip-prinsip UNCLOS 1982, sedangkan secara diplomasi membangun diplomasi pada level organisasi dan pada level negara. Diplomasi yang diupayakan adalah menjaga stabilitas keamanan regional bersama antara negara ASEAN dengan China dan saling menjaga diri agar tidak terjadi ketegangan militer.³²

H. Upaya Pemerintahan Joko Widodo Dalam Mempertahankan Stabilitas Kawasan Laut China Selatan

Indonesia sebagai salah satu *founding fathers* ASEAN, memiliki tanggung jawab untuk memainkan peran yang penting dalam menciptakan perdamaian dan keamanan maritim di kawasan. Kepentingan Indonesia di LCS adalah menjaga stabilitas regional Asia Tenggara. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, menekankan pada pendekatan aktor diplomasi aktif yang mencari penyelesaian damai untuk menghindari persengketaan yang lebih luas. Hal ini demi melindungi kepentingan-kepentingannya sendiri di sekitar Kepulauan Natuna.

Sebagai *non-claimant states*, Indonesia dapat memainkan peran sebagai *honest broker* (perantara yang tidak memihak) dalam penyelesaian sengketa di Laut China Selatan Peran sebagai *honest broker* dalam konflik di Laut China Selatan telah dijalankan sejak tahun 1990. Hal tersebut diwujudkan dengan peran Indonesia menjadi tuan rumah lokakarya-lokakarya

permasalahan Laut China Selatan sejak tahun 1990- 2014.³³ Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo terus mendorong dan berpartisipasi aktif dalam mengupayakan terbentuknya *Declaration of Conduct* (DoC) dan kemudian *Code of Conduct* (CoC) untuk menekan ketegangan konflik di Laut China Selatan.

Pada kesempatan tersebut Indonesia menyarankan pernyataan *ASEAN Point Ministers on Peace, Security and Stability in the Region*. Inti dari pernyataan tersebut menegaskan bahwa ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan harus tetap melindungi “rumah” mereka agar tetap menjadi kawasan yang stabil dan damai. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi ajang penyatuan suara ASEAN untuk menjaga dan mempromosikan perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan serta menjunjung tinggi Piagam PBB, *ASEAN Charter*, dan TAC dalam melaksanakan hubungan antar negara. Akhirnya pada pertemuan AMM ke-49 tanggal 26 Juli 2016 di Vientiane, Laos, Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN berhasil mencapai kesepakatan untuk menyusun sebuah *joint communiqué*. Kesepakatan *joint communiqué* tersebut memuat pandangan satu suara ASEAN terhadap perkembangan situasi terkini di Laut China Selatan.³⁴

Konsultasi dan pendekatan intensif yang dilakukan oleh Menlu RI pada akhirnya berhasil mendorong Menlu ASEAN untuk menyepakati *Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security, and Stability in the Region*, yang memuat elemen-elemen penekanan komitmen untuk memastikan kawasan tetap damai, stabil dan aman, memajukan hubungan yang saling menguntungkan, terus menjunjung tinggi norma-norma dasar yang mengatur hubungan dan kerja sama antar negara, menekankan posisi bersama ASEAN dalam *Joint Communique of the 49th AMM*, menahan diri dan menghindari kegiatan yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan, meningkatkan persatuan, solidaritas, dan sentralitas ASEAN, serta mengajak negara lain untuk menghormati norma-norma dan prinsip dari ASEAN.³⁵

I. Simpulan

Aksi yang dilakukan China di kawasan Laut China Selatan bukan hanya mengklaim secara kawasan tetapi juga mengelola dan mengeksploitasi pulau-pulau dan sumber daya alam yang berada di LCS. China membangun kawasan tersebut lengkap dengan kekuatan pertahanan didalamnya, disini China sangat menunjukkan hegemoninya di kawasan Laut China Selatan. Bahkan di Natuna, China melangsungkan hegemoninya dengan melayarkan kapal-kapal nelayan dan melakukan *illegal fishing* dikawasan perairan Natuna, melanggar ZEE Indonesia dan tidak lupa didampingi *Coast Guard*-nya dengan kapal-kapal besar. Hal ini bukanlah ketidak sengajaan China

yang melewati batas negara Indonesia melainkan sebuah penyampaian maksud ingin menguasai sebagian perairan Natuna yang di klaimnya dalam peta *Nine-Dash Line* sebagai kedaulatan negara China. .

Dalam menjaga kepentingan pertahanan kedaulatan wilayah Indonesia, Presiden Joko Widodo merespon aksi China ini dengan bertahap, mulai dari meningkatkan keamanan Natuna dengan membuat pangkalan militer pertahanan di wilayah Natuna dan menggelar latihan militer, mengirim nota protes kepada kedutaan besar China di Indonesia, sampai mengeluarkan peta baru dengan nama Laut Natuna Utara yang menggantikan Laut China Selatan serta tanda penegasan batas wilayah Indonesia. Terakhir, Presiden Joko Widodo mengunjungi Natuna untuk ke-3 kalinya dan meninjau langsung serta dalam rangka penegasan sikap Indonesia atas ketetapan kedaulatannya. Sejak dulu hingga pada masa pemerintahan Joko Widodo kini, Indonesia adalah negara penengah dengan sikap yang netral dan tidak memihak pada blok tertentu sesuai dengan arah politik luar negeri Indonesia.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi hegemoni China di kawasan Laut China Selatan terbilang tidak mencapai keberhasilan dengan masuknya kembali kapal China ke wilayah Natuna pada akhir tahun 2019, serta dengan China yang tetap menjalankan klaim *Nine-Dash Line*-nya di kawasan Laut China Selatan. Belum meredanya konflik di kawasan Laut China Selatan ini menjadi tanda bahwa upaya pemerintah Indonesia masih belum maksimal dalam menghadapi kekuatan hegemoni China di kawasan Laut China Selatan termasuk juga pada kedaulatan Indonesia di kawasan Natuna.

Endnote :

¹ Wiranto Surya. *Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut China Selatan*. Yogyakarta : Leutika Prio, 2016. Hal. 4.

² Anne Ahira. *Laut China Selatan – wilayah sengketa, beragam nama*. Terdapat di www.aneahira.com Diakses pada 11 September 2019

³ Japan Foundation Jakarta. *Jepang ndonesia dan Konflik Laut China Selatan*. Terdapat di <http://www.jpj.or.id/id/jepang-indonesia-dan-konflik-laut-china-selatan> diakses pada 9 september 2019

⁴ Kurnia Ilahi. *Indonesia di Pusaran Konflik Laut Chian Selatan*. Sindo News. Terdapat di <http://nasional.sindonews.com/read/1055705/19/indonesia-di-pusaran-konflik-laut-China-selatan-1445604047>. diakses pada 3 september 2019

⁵ Aktual.co. *Kemenkopolhukam RRC Klaim Wilayah Natuna*. Terdapat di <http://www.aktual.co/hukum/233137kemenkopolhukam-rrc-klaim-wilayah-Natuna> diakses pada 9 September 2019

⁶ Daniel S. Papp. *Cotemporary International Relations; framework for understanding*. 5th editions. London: Macmilan Publishing Company. 1988. Hal 44

⁷ Mochtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES. 1994. Hal. 19

- ⁸ Yuni Ardiani. *Keperntingan Bantuan Luar Negeri Jepang Dengan Menggunakan Skema Official Development Assistance (ODA) Dalam Pembangunan Ekonomi di Tiongkok*. Skripsi FISIP UNILA. 2019. Hal 26-27. Terdapat di <http://digilib.unila.ac.id/55241/> diakses pada 30 November 2019
- ⁹ James E. Dougherty. *Teori-Teori Hubungan Internasional: Sebuah Survei Komprehensif*. Yogyakarta: LP3M. 2014. Hal. 60
- ¹⁰ Dwi Sulisworo, dkk. *Geopolitik Indonesia*. Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional. 2012. Hal. 16. Terdapat di <http://eprints.uad.ac.id> diakses pada 1 September 2019
- ¹¹ Keliat M. *Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Vol 13. No.1. Juli 2009 (111-129). Hal.113. Terdapat di <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10970> diakses pada 2 September 2019
- ¹² Griffiths M. dan Terry O'Callghan. *International Relations :the key concepts*. Routledge: New York. 2002. Hal. 120.
- ¹³ Diterjemahkan mandiri oleh penulis menggunakan bantuan *Google Translate*
- ¹⁴ Yulius P. Hermawan. *Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007. Hal.185.
- ¹⁵ Robert Gilpin. *War And Change In World Politics*. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press. 1981. dalam Yeom Ji Won. *Pembentukan Hegemoni*. FISIP UI. 2015. Hal 13-14.
- ¹⁶ Yanuar Ikbar, *Ekonomi Politik Internasional 2* , (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 23
- ¹⁷ Yazid A.P. *The Theory Of Hegemonic Stability, Hegemonic Power And International Political Economic Stability*. Global Journal Political Science and Administration. 2015. Hal 68
- ¹⁸ Ibid. Hal. 71
- ¹⁹ Suhartati M. Natsi, dkk. *Bentuk di Perairan Kepulauan Natuna*. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis. Vol. 3, No. 2. 2019. Hal. 21-31. Terdapat di <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/53347> diakses pada 20 September 2019
- ²⁰ Ibid
- ²¹ Kompas Nasional. *Jokowi: Produksi Perikanan di Natuna Hanya 8,9 Persen dari Potensi yang Ada*. Terdapat di <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/29/13571141/jokowi.produksi.perikanan.di.natuna.hanya.a.8.9.persen.dari.potensi.yang.ada> diakses pada 29 september 2019
- ²² Dam syamsyumar. *Politik kelautan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010. Hal. 231.
- ²³ Muhammad Tri Andika. *Op.Cit*. Hal. 172-173
- ²⁴ Pete Cobus. *Konflik dan Diplomasi di Laut China Selatan*. VOA News. 2017. Tersedia di <https://projects.voanews.com/south-chinasea/indonesian/> diakses pada 04 Oktober 2019
- ²⁵ Scott Enright & Associates. *One Belt One Road: Insights for Finland*. Team Finland Future Watch Report. 2016. Hal. 3.
- ²⁶ Viva Budy. *Berapa Investasi Asing Tiongkok ke Indonesia?*. Databoks. 2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/20/berapa-nilai-investasi-tiongkok-ke-indonesia> diakses pada 4 Januari 2019
- ²⁷ Aaroon L. Connely. *Loc.Cit*.
- ²⁸ Butje Tampi. *Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis)*. Jurnal Hukum Unsrat Vol. 23. 2017. Terdapat di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/18589> diakses pada 3 November 2019
- ²⁹ Deutsche Welle. *Kekuatan Laut Negara yang Bertikai di Laut Chia Selatan*. Terdapat di <https://www.dw.com/overlay/media/id/kekuatan-laut-negara-yang-bertikai-dilaut-China-selatan/39822238/40443970>, diakses pada 20 November 2019

- ³⁰ Rambu Asana. *Kebijakan Pertahanan Indonesia Terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar Pada Masa Pemerintahan Jokowi*. Jurnal Cakrawala. Vol. 6. no. 1 (pp.35-58). 2017. Hal 45. Terdapat di <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/1286> diakses pada 2 Desember 2019
- ³¹ BPPK KEMENLU. *Laporan Akhir Riset*. Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM. 2015. Hal. 6.
- ³² Adityo Arifianto. *Op.Cit.* Hal 137-138
- ³³ Muhammad Tri Andika. *Op.Cit.* Hal 173
- ³⁴ *Ibid.* Hal. 80.
- ³⁵ Adityo Arifianto. *Op.Cit.* Hal. 135-136.

Daftar Pustaka

- Aktual.co. Kemenkopolkam RRC Klaim Wilayah Natuna. Terdapat di <http://www.aktual.co/hukum/233137kemenkopolkam-rrc-klaim-wilayah-Natuna> diakses pada 9 September 2019
- Anne Ahira. Laut China Selatan – wilayah sengketa, beragam nama. Terdapat di www.anneahira.com Diakses pada 11 September 2019
- BPPK KEMENLU. Laporan Akhir Riset. Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM. 2015. Hal. 6.
- Butje Tampi. Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis). Jurnal Hukum Unsrat Vol. 23. 2017. Terdapat di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/18589> diakses pada 3 November 2019
- Dam syamsyumar. Politik kelautan. Jakarta: Bumi Aksara. 2010. Hal. 231.
- Daniel S. Papp. *Cotemporary International Relations; framework for understanding*. 5th editions. London: Macmilan Publishing Company. 1988. Hal 44
- Deutsche Welle. Kekuatan Laut Negara yang Bertikai di Laut Chia Selatan. Terdapat di <https://www.dw.com/overlay/media/id/kekuatan-laut-negara-yang-bertikai-dilaut-China-selatan/39822238/40443970>, diakses pada 20 November 2019

- Dwi Sulisworo, dkk. Geopolitik Indonesia. Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional. 2012. Hal. 16. Terdapat di <http://eprints.uad.ac.id> diakses pada 1 September 2019
- Griffiths M. dan Terry O'Callghan. International Relations :the key concepts. Routledge: New York. 2002. Hal. 120.
<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/29/13571141/jokowi.produksi.perikanan.di.natuna.hanya.a.8,9.persen.dari.potensi.yang.ada> diakses pada 29 september 2019
- James E. Dougherty. Teori-Teori Hubungan Internasional: Sebuah Survei Komprehensif. Yogyakarta: LP3M. 2014. Hal. 60
- Japan Foundation Jakarta. Jepang ndonesia dan Konflik Laut China Selatan. Terdapat di <http://www.jpf.or.id/id/jepang-indonesia-dan-konflik-laut-china-selatan> diakses pada 9 september 2019
- Keliat M. Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Vol 13. No.1. Juli 2009 (111-129). Hal.113. Terdapat di <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10970> diakses pada 2 September 2019
- Kompas Nasional. Jokowi: Produksi Perikanan di Natuna Hanya 8,9 Persen dari Potensi yang Ada. Terdapat di
- Kurnia Ilahi. Indonesia di Pusaran Konflik Laut Chian Selatan. Sindo News. Terdapat di <http://nasional.sindonews.com/read/1055705/19/indonesia-di-pusaran-konflik-laut-China-selatan-1445604047>. diakses pada 3 september 2019
- Mochtar Mas' oed. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES. 1994. Hal. 19
- Pete Cobus. Konflik dan Diplomasi di Laut China Selatan. VOA News. 2017. Tersedia di <https://projects.voanews.com/south-chinasea/indonesian/> diakses pada 04 Oktober 2019
- Rambu Asana. Kebijakan Pertahanan Indonesia Terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar Pada Masa Pemerintahan Jokowi. Jurnal Cakrawala. Vol. 6. no. 1 (pp.35-58). 2017. Hal 45. Terdapat di

<https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/1286> diakses pada 2 Desember 2019

Robert Gilpin. War And Change In World Politics. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press. 1981. dalam Yeom Ji Won. Pembentukan Hegemoni. FISIP UI. 2015. Hal 13-14.

Scott Enright & Associates. One Belt One Road: Insights for Finland. Team Finland Future Watch Report. 2016. Hal. 3.

Suhartati M. Natsi, dkk. Bentuk di Perairan Kepulauan Natuna. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis. Vol. 3, No. 2. 2019. Hal. 21-31. Terdapat di <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/53347> diakses pada 20 September 2019

Viva Budy. Berapa Investasi Asing Tiongkok ke Indonesia?. Databoks. 2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/20/berapa-nilai-investasi-tiongkok-ke-indonesia> diakses pada 4 Januari 2019

Wiranto Surya. Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut China Selatan. Yogyakarta : Leutika Prio. 2016. Hal. 4.

Yanuar Ikbar, Ekonomi Politik Internasional 2 , (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 23

Yazid A.P. The Theory Of Hegemonic Stability, Hegemonic Power And International Political Economic Stability. Global Journal Political Science and Administration. 2015. Hal 68

Yulius P. Hermawan. Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007. Hal.185.

Yuni Ardiani. Kepentingan Bantuan Luar Negeri Jepang Dengan Menggunakan Skema Official Development Assitance (ODA) Dalam Pembangunan Ekonomi di Tiongkok. Skripsi FISIP UNILA. 2019. Hal 26-27. Terdapat di <http://digilib.unila.ac.id/55241/> diakses pada 30 November 2019